

BAB V

KESIMPULAN

Keamanan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh suatu negara agar bisa dikatakan sebagai negara berdaulat. Definisi dari keamanan itu sendiri memang cukup luas, namun secara garis besar keamanan bagi suatu negara bisa dikatakan ketika tidak adanya ancaman yang dapat mengganggu aktivitas roda pemerintahan, baik domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia berupaya untuk menciptakan keamanan di negaranya melalui berbagai cara. Dari sisi domestik misalnya negara meningkatkan sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Di sisi lain, dalam dunia internasional, keamanan wilayah menjadi perhatian sebagai upaya pencegahan perang. Negara-negara cenderung membentuk kerjasama maupun sebuah aliansi untuk mengumpulkan masa dan memperoleh kekuatan.

Hal ini tidak terkecuali bagi Korea Selatan. Setelah menjadi korban Perang Korea yang terjadi dari tahun 1950-1953, ancaman keamanan selalu menghantui negara ini. Gencatan senjata yang menghentikan perang antar kedua negara bersaudara—Korea Selatan dan Korea Utara— tidak bisa menjamin bahwa perang tidak akan kembali terjadi. Ditambah lagi dengan aktifitas pembuatan senjata nuklir yang masif di Korea Utara.

Sejak berakhirnya perang dingin, Pyongyang secara konstan memberikan ancaman kepada Korea Selatan terkait uji coba nuklir yang bisa saja ditujukan ke wilayah Korea Selatan. Tidak hanya Korea Selatan, tetapi sekutunya Amerika Serikat (AS) bersama Jepang juga menjadi target Korea Utara.

Berbagai upaya dilakukan oleh ketiga negara tersebut untuk menghentikan uji coba senjata nuklir Pyongyang. Sejak tahun 1994 Korea Selatan, AS dan Jepang telah melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Pertemuan awal itu dilaksanakan di tingkat wakil menteri dan disebut *Defense Trilateral Talks (DTT)*. Pertemuan antar 3 negara ini terus dilakukan dengan

tujuan yang sama hingga tahun 2008 dimana pertemuan tersebut telah berkembang dan berevolusi menjadi *Six Party Talks* yang juga melibatkan Federasi Rusia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara. Meskipun begitu, pertemuan trilateral antara ketiga negara anggota awal masih dilaksanakan.

Menghadapi ancaman Korea Utara yang semakin besar, AS mengusung sebuah ide untuk membentuk *Trilateral Military Alliance*, sebuah aliansi antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang terintegrasi dan terlembagakan karena ketiga negara berbagi tujuan yang sama yaitu denuklirisasi Korea Utara dan merupakan target utama senjata nuklirnya. Aliansi ini dapat membawa keuntungan bagi negara anggotanya, dimana ketiganya dapat menghemat biaya kerjasama, adanya *sharing burden*, efektifitas dari minilateralisme, serta efek *deterrence* bagi Korea Utara apabila mereka benar-benar akan memecah perang. Namun, Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae In memilih untuk menolak bergabung dalam aliansi militer tersebut.

Penolakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat Korea Selatan meminta kepada pemerintah untuk berfokus pada urusan domestik. Melalui berbagai demonstrasi dan survey-survey yang dipublikasikan di media massa, masyarakat menyuarakan pendapatnya mengenai sikap yang perlu diambil pemerintah. Masyarakat lebih menyetujui apabila pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Pandangan negatif tentang Korea Utara sudah banyak berubah. Dari awalnya dianggap sebagai ancaman militer, Korea Utara kini dianggap sebagai saudara oleh masyarakat.

Sebaliknya, pandangan positif terhadap AS sebagai pelindung Korea Selatan kini mulai memudar, digantikan dengan pandangan bahwa AS adalah sebuah hambatan bagi proses rekonsiliasi semenanjung Korea.

Lain halnya dengan Jepang, sejak berakhirnya kolonialisme Jepang di Korea, pandangan masyarakat terhadapnya tidak banyak berubah. Jepang tetap dianggap sebagai negara yang agresif yang telah memberikan luka mendalam bagi masyarakat. Masalah utama yang menjadi perhatian adalah *comfort women* dimana banyak wanita-wanita Korea yang dijadikan penghibur

oleh tentara Jepang dengan cara yang sadis dan Jepang enggan untuk mengakui akan hal tersebut.

Partai Demokrat yang mendukung rekonsiliasi dengan Korea Utara menjadi kini mendominasi kursi parlemen, sehingga kebijakan tersebut jelas menjadi perhatian utama di dalam negeri.

Faktor selanjutnya adalah dari konteks internasional. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian pemerintah Seoul adalah nuklir Korea Utara. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghentikannya, termasuk dengan pembentukan *trilateral military alliance* antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Tetapi RRT merasa tidak nyaman apabila aliansi tersebut benar-benar terbentuk karena dianggap akan menyebabkan instabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

RRT memberikan sanksi *unofficial* kepada Korea Selatan dimana mereka menghentikan ekspor-impor barang dan jasa, melarang pariwisata dan menghentikan penayangan acara yang berasal dari Korea Selatan, termasuk melarang artis dari negeri ginseng tersebut untuk tampil di RRT. Beijing juga memiliki posisi penting bagi Korea Selatan dimana ia diyakini bisa membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan untuk denuklirisasi tanpa jalur militer.

Atas upaya Moon Jae In untuk melakukan perbaikan hubungan dengan RRT, sanksi tersebut mulai melonggar. Tetapi RRT memberikan penawaran berupa perjanjian yang disebut *three nos* yaitu, tidak ada tambahan instalasi THAAD di Korea Selatan (dalam hal ini tambahan yang dimaksud ialah baterai maupun *launcher*); tidak ada partisipasi dalam sistem pertahanan rudal strategis bersama AS; dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral Korea Selatan-AS-Jepang. Korea Selatan kemudian menyampaikan kepada publik bahwa mereka setuju dan memilih untuk patuh pada *three nos* ini meskipun mendapat kecaman dari AS. Sejak saat itu, Korea Selatan menjaga jarak dengan AS dan Jepang. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Korea Selatan menolak untuk bergabung dengan *trilateral military alliance* bersama AS dan Jepang karena adanya pengaruh yang terjadi

di politik domestik Korea Selatan serta adanya tekanan dari RRT dan disepakatinya *three nos* oleh Korea Selatan.